



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27408>
Volume 10, No. 4, 2025 (2728-2737)

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) GUMILANG JAYA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

Firman Maulana¹⁾; Gatot Wahyu Nugroho²⁾; Elan Eriswanto³⁾

^(1,2,3) Study Program of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

¹⁾ firmanmaulana18042000@gmail.com; ²⁾ gatotwahyunu2@gmail.com; ³⁾ elaneriswanto@ummi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gumilang Jaya di Desa Gunungbatu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan keuangan BUMDes dengan standar yang seharusnya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari berbagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya menerapkan lima tahapan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kendala signifikan yang teridentifikasi seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemahaman akuntansi dan manajemen keuangan, sistem administrasi keuangan yang belum memadai dan rentan kesalahan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang optimal kepada pemangku kepentingan, terutama terkait akses masyarakat terhadap detail catatan keuangan dan partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, BUMDes, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

This study aims to analyze the financial management of the Gumilang Jaya Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Gunungbatu Village, Cilograng District, Lebak Regency. The main focus of the study is to evaluate the suitability of BUMDes financial management practices with the applicable standards and to identify the obstacles encountered. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and document analysis from various informants. The results indicate that the financial management of BUMDes Gumilang Jaya follows five main stages: planning, implementation, record-keeping, accountability, and supervision. Significant challenges identified include limitations in human resources

(HR) understanding of accounting and financial management, an inadequate and error-prone financial administration system, and insufficient transparency and accountability to stakeholders, particularly regarding public access to financial records and active participation in planning meetings.

Keywords: Financial Management, BUMDes, Transparency, Accountability

1. Pendahuluan

Menurut UU No. 6/2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha ekonomi desa yang didirikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan potensi lokal. BUMDes dalam pelaksanaannya yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya desa secara efisien adalah tiga tanggung jawab utama BUMDes (Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikatakan berhasil apabila pengelolaan keuangannya baik. Pengelolaan keuangan dalam hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban atau pelaporan dan terakhir pengawasan dengan perencanaan keuangan yang transparan dan akuntabel. BUMDes dapat mengoptimalkan pendapatan, mengurangi risiko kerugian, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada melalui pengelolaan keuangan yang baik. Di sisi lain, operasi dan keberlanjutan BUMDes dapat terganggu akibat pengelolaan keuangan dengan sumber daya manusia yang tidak memadai, kurangnya uang, kesulitan dalam memenuhi komitmen, dan kebangkrutan dapat terjadi akibat pengelolaan keuangan yang buruk.

Namun, pengelolaan keuangan yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gumilang Jaya dalam pelaksanaannya belum ideal, akibat masalah akuntabilitas dan keterbukaan dalam manajemen keuangan, Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan masih jadi masalah. Terbukti dari pembukuan yang masih sederhana dan belum sesuai dari standar akuntansi yang ada. Manajemen BUMDes Gumilang Jaya secara umum tidak memiliki keahlian yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Akses masyarakat yang terbatas terhadap catatan keuangan dan jumlah forum yang sedikit untuk diskusi tentang pengelolaan keuangan BUMDes.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gumilang Jaya di Desa Gunungbatu, untuk

mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar yang seharusnya diterapkan. Selain itu, saya juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan tantangan yang ada.

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi penulis, pengalaman langsung dalam meneliti pengelolaan keuangan BUMDes telah meningkatkan kemampuan penelitian kualitatif dan memperluas pengetahuan di bidang ini, yang tentunya akan berguna untuk pengembangan profesi dan keilmuan di masa depan. Sementara itu, bagi pengurus BUMDes, penelitian ini menyajikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap usaha dan pendapatan desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga membantu mengidentifikasi kendala serta solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Di sisi lain, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca, termasuk kalangan akademisi, masyarakat umum, dan pihak lain yang tertarik dengan pengelolaan BUMDes. Pembaca dapat memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung keberlanjutan BUMDes, serta mendapatkan wawasan yang dapat diterapkan di desa lain dengan situasi serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi penulis dan pengurus BUMDes, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin belajar dari pengalaman dan hasil penelitian ini.

2. Kajian Pustaka

BUMDes adalah lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi, mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (Risalah & Eriswanto, 2023).

Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dengan Tujuan pembentukan Badan Usaha milik desa (Suherman, 2018).

Menurut Ridwan (2014) Karakteristik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan bahwa BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang unik dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kepemilikan modal yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, BUMDes berfungsi sebagai usaha kolektif yang memiliki tujuan ganda, yaitu mencari keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagai badan hukum, BUMDes memiliki kekayaan terpisah yang memungkinkan pengelolaan aset

secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes melalui musyawarah desa menegaskan pentingnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, sehingga BUMDes dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya keuangan yang efisien, efektif, dan akuntabel, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan mencakup sejumlah elemen penting yang harus diperhatikan. Beberapa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan berkelanjutan. Menurut Henny Sulistianingsih et al., (2024) Membuat keputusan tentang manajemen kas, investasi, dan pendanaan, serta menganalisis kinerja keuangan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif adalah konsep dasar manajemen keuangan.

Menurut Haviya et al., (2022) tahapan dalam pengelolaan keuangan meliputi beberapa langkah penting. Pertama, perencanaan keuangan dilakukan oleh badan usaha untuk memperkirakan pengeluaran dan kegiatan selama satu tahun atau lebih, biasanya melalui Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang disusun dalam rapat. Selanjutnya, pelaksanaan melibatkan penerapan rencana yang telah dibuat, baik dalam pengeluaran dana maupun kegiatan di lapangan. Tahap penatausahaan mencakup pencatatan semua transaksi keuangan oleh unit usaha dan bendahara BUMDes, yang kemudian diserahkan untuk laporan pertanggungjawaban. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan menyampaikan informasi keuangan terkait pengeluaran dan pemasukan, disertai dokumentasi dan bukti transaksi, serta laporan yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang disepakati, yang biasanya dilaporkan kepada pemerintah desa untuk evaluasi. Terakhir, pengawasan bertujuan memastikan bahwa semua kegiatan keuangan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya desa melalui pemantauan penggunaan dana dan evaluasi kinerja pengelola.

Pengelolaan keuangan BUMDes harus mengikuti standar yang telah ditetapkan, namun penerapannya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan skala BUMDes. Setiap BUMDes wajib menerapkan prinsip dasar pengelolaan keuangan seperti pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dari keuangan pribadi, dan pelaporan berkala. BUMDes skala kecil seperti BUMDes Gumilang Jaya dapat menggunakan sistem pencatatan sederhana asalkan tetap mencatat semua transaksi dan menyimpan bukti-buktinya.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Naili Rofidah (2019) tentang analisis pengelolaan keuangan badan usaha milik desa gondowangi

(2019) menemukan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes seringkali belum didukung oleh dokumen tertulis yang lengkap, sistem pencatatan yang terstandar, serta pelaporan yang terbuka kepada masyarakat. Di sisi lain, penelitian Sofyani et al., (2019) dengan judul *success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia* dan Agunggunanto et al., (2016) dengan judul *pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa mengidentifikasi bahwa BUMDes yang berhasil umumnya memiliki sistem manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, dan didukung oleh perencanaan strategis serta pengendalian internal yang efektif*.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada analisis pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gumilang Jaya di Desa Gunungbatu, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi didasarkan pada representasi BUMDes dalam dinamika pengelolaan keuangan, aksesibilitas data, serta adanya isu dan potensi yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang divalidasi melalui pemahaman mendalam terhadap metode kualitatif, penguasaan teori, dan kesiapan lapangan.

Menurut Sugiyono (2022:241) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pengumpulan data dengan triangulasi yaitu mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, menggabungkan observasi langsung terhadap operasional BUMDes dan dokumen, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci seperti direktur, bendahara, sekretaris, kepala unit usaha BUMDes, kepala desa Gunungbatu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang terkait. Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, jurnal, buku, dan situs web resmi terkait. Sumber data pada artikel penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari observasi langsung ke lapangan, wawancara kepada informan dan dokumentasi berupa catatan kegiatan operasional, foto kegiatan. Sedangkan sumber data sekunder seperti dari laporan bulanan maupun laporan pertanggungjawaban di akhir tahun, peraturan pemerintah tentang BUMDes, data program kerja BUMDes dan lainnya.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sepanjang proses penelitian, dimulai dari studi pendahuluan untuk menentukan fokus, dilanjutkan dengan reduksi data (merangkum, memilih hal pokok, mencari tema dan pola),

penyajian data (dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau flowchart), dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi data, diskusi, dan member checking untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan.

4. Hasil dan Pembahasan

1) Pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya

perencanaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, yaitu membuat anggaran tahunan, membedakan keuangan usaha dari keuangan pribadi pengurus, dan melibatkan pemerintah desa dalam proses perencanaan. Namun, berdasarkan temuan wawancara dan dokumentasi, perencanaan keuangan harus lebih komprehensif dengan dokumen perencanaan yang lebih standar, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan rencana bisnis untuk setiap unit usaha. Ini akan membuat perencanaan keuangan lebih fokus pada pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes telah ada perencanaan anggaran yang disetujui dan pelaksanaan yang sistematis, Namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Proses pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap transaksi dicatat secara manual dan diawasi oleh pengurus. Namun, perubahan anggaran yang sering terjadi, keterlambatan pencairan dana, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam akuntansi menjadi hambatan dalam pelaksanaan. Pengurus BUMDes berupaya mengatasi masalah ini dengan menghemat dana dan memprioritaskan kebutuhan mendesak, serta menyadari pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi sistem keuangan untuk efisiensi di masa depan.

Penatausahaan keuangan dilakukan secara manual dan teratur melalui buku kas umum dengan pencatatan yang rinci dan dukungan dokumen transaksi, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara, meskipun memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi formal seperti SAK-ETAP, dan kurangnya pengetahuan SDM tentang akuntansi menjadi tantangan utama. Selain itu, kelengkapan bukti transaksi, terutama untuk pengeluaran kecil, seringkali tidak memadai. Pengurus BUMDes berencana untuk mengikuti pelatihan dan mempertimbangkan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pengelolaan keuangan, sehingga tata kelola keuangan dapat lebih baik di masa mendatang.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan berkala disusun dan disampaikan kepada pemerintah desa serta pemangku kepentingan, dengan mekanisme yang jelas dan upaya untuk meningkatkan transparansi, masih terdapat tantangan yang signifikan. Format laporan yang sederhana dan

kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi mengakibatkan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kesulitan dalam menyusun laporan akibat bukti transaksi yang tidak lengkap dan sistem pencatatan yang manual menjadi hambatan. Pengurus BUMDes berencana untuk mengikuti pelatihan dan menggunakan aplikasi akuntansi sederhana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga pertanggungjawaban keuangan dapat lebih efektif dan akurat di masa mendatang.

Pengawasan pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pengawasan eksternal dilakukan setiap enam bulan oleh pemerintah desa dan BPD, sementara pengawasan internal dilakukan melalui rapat bulanan di mana laporan keuangan dipresentasikan. Namun, terbatasnya jumlah pengawas yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, serta pengawasan yang lebih bersifat administratif, mengakibatkan potensi kelalaian dalam menemukan masalah keuangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif, sehingga pengelolaan keuangan BUMDes dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

2) Standar Pengelolaan Keuangan BUMDes Gumilang Jaya

Kesesuaian pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya dengan SAK ETAP dan PP No. 11 Tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun BUMDes telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, masih terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahunan telah disusun dengan melibatkan pemerintah desa, namun dokumen tersebut masih sederhana dan tidak sepenuhnya mengikuti standar akuntansi formal. Pelaksanaan keuangan menggunakan RAB dan pencatatan manual sudah dilakukan, tetapi kurangnya teknologi dan mekanisme formal mengakibatkan perubahan anggaran yang tidak terencana. Laporan keuangan yang disampaikan juga belum mencakup semua elemen yang diperlukan sesuai SAK ETAP, dan pengawasan yang dilakukan masih bersifat administratif dengan partisipasi masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman akuntansi, penggunaan teknologi, dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik dengan standar yang berlaku.

Kesesuaian pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan BUMDes, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan, menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang baik dalam hal transparansi melalui laporan keuangan berkala dan papan

informasi, akses masyarakat terhadap catatan keuangan yang lebih detail masih terbatas. Akuntabilitas ditunjukkan melalui mekanisme verifikasi oleh BPD, namun pemahaman yang kurang tentang akuntansi dan kelengkapan bukti transaksi dapat menurunkan tingkat akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan BUMDes belum optimal, dengan keterlibatan yang tidak rutin. Upaya keberlanjutan bisnis terlihat dari pembagian keuntungan untuk modal dan kerja sama dengan pihak ketiga, tetapi kegagalan beberapa unit usaha menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan masih perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, tantangan dalam SDM dan sistem administrasi keuangan yang manual dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes di masa depan.

3) Kendala Pengelolaan Keuangan BUMDes Gumilang Jaya

Kendala pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor signifikan yang menghambat optimalisasi kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan, di mana pengurus, terutama bendahara, belum memahami standar akuntansi formal seperti SAK-ETAP dan belum menerima pelatihan yang memadai, menyebabkan pengelolaan keuangan yang reaktif. Kedua, sistem administrasi keuangan yang belum memadai, dengan penggunaan metode manual yang rentan terhadap kesalahan dan laporan keuangan yang sederhana, menyulitkan evaluasi kinerja dan integrasi data. Ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, di mana akses masyarakat terhadap catatan keuangan yang rinci masih terbatas dan partisipasi aktif dalam perencanaan serta pengawasan BUMDes masih rendah. Semua kendala ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan BUMDes di masa depan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- 1) Lima tahapan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan telah digunakan untuk mengelola keuangan BUMDes Gumilang Jaya. Meskipun proses ini sudah terorganisir, dengan RAB tahunan, pencatatan transaksi manual, pelaporan berkala kepada pemerintah desa dan BPD, dan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, masih ada beberapa keterbatasan di setiap langkahnya.
- 2) Standar akuntansi resmi seperti SAK ETAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 masih belum dipenuhi oleh pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya. Contohnya adalah RAB yang masih sederhana, sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual, laporan keuangan yang belum lengkap, dan pengawasan yang perlu ditingkatkan. BUMDes Gumilang Jaya telah berusaha menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi, tetapi masih perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai hasil yang optimal.

- 3) Salah satu kendala utama dalam pengelolaan keuangan BUMDes Gumilang Jaya adalah SDM yang tidak memadai dalam akuntansi dan manajemen keuangan. Sistem administrasi keuangan yang tidak memadai, masih dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan dan tidak cukup transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan akses ke catatan keuangan.

Saran

- 1) Pengurus BUMDes Gumilang Jaya harus memprioritaskan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan akuntansi dan manajemen keuangan. Selain itu, sangat penting untuk mulai menggunakan sistem pencatatan yang lebih canggih, yang tidak lagi dilakukan secara manual, untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki bukti lengkap. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, setiap unit usaha harus memiliki rencana bisnis yang jelas.
- 2) Pemerintah desa dan masyarakat harus lebih aktif mendukung BUMDes. Pemerintah desa dapat memberikan atau mengarahkan untuk melakukan pelatihan akuntansi, sementara masyarakat harus lebih terlibat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan BUMDes, dengan memberikan akses yang lebih mudah ke laporan keuangan yang transparan.
- 3) Untuk menemukan praktik terbaik, peneliti selanjutnya dapat membandingkan BUMDes Gumilang Jaya dengan BUMDes lain yang lebih berhasil. Penelitian juga dapat berkonsentrasi pada pembuatan sistem akuntansi yang tepat untuk BUMDes kecil dan mengevaluasi seberapa efektif pelatihan bagi pengelola BUMDes.

6. Daftar Pustaka

- 2015, P. P. N. . T. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015. In *Jakarta*.
- Agunggunanto, E. Y., & Arianti Fitrie, Kushartono, Edi Wibowo, D. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Dr. Henny Sulistianingsih, S.E., M. S., Helmy Kasim, S.E., M. S., Ika Listyawati, S.E., M.Si., A., Dr. Windu Mulyasari, S.E., M.Si., CSRS., C., Nataliana Bebasari, S.E., M. M., Mohklas, S.E., M. S., Kasman, S.E., M. M., Debi Eka Putri, S.E., M. M., Diah Wuriyah Ningsih, S.E., M. M., Dr. Abdurrohman, S.E., M. M., Dr. Hasanudin, M. M., Dr. H. Yusuf Iskandar, S.E., M. M., Rahmi Nur Islami, S.M., M. M., Titis

- Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M., CRA., CRP., C., & Nungki Pradita, S.E., M. M. (2024). *KONSEP DASAR MANAJEMEN KEUANGAN* (A. Bambang Arianoto, S.E., M.A., M.Ak. (ed.)). CV. Eureka Media Aksara.
- Haviya, O., Gowon, M., & Erwati, M. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 3(2), 201–212.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Ridlwan, Z. (2014). URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).
- Risalah, A. D., & Eriswanto, E. (2023). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra Warga Pada Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 169.
- Rofidah, N. (2019). Analisis pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) Gondowangi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik ...*, 1–79.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2).
- Suherman, A. (2018). Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pusat Perekonomian Masyarakat Desa. *Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen*, 7(13), 92–98.